

Dampak Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pengendalian Inflasi di Indonesia

Dwi Widiarsih¹

Ika Kholista Nurrohmah¹

Lisbet Angreani Siregar¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Riau
dwiwidiarsih@umri.ac.id

Received: 25/11/2025; Revised: 15/06/2026; Accepted: 16/06/2026; Published: 30/06/2026

ABSTRACT

This study discusses the impact of public governance on inflation control in Indonesia amidst global and domestic economic dynamics. The main problem addressed is the extent to which institutional and non-monetary factors affect the achievement of monetary policy targets. This study employed a path analysis method using time-series data from 2010 to 2022. The analysis aimed to examine the effect of corruption control and political stability variables on the inflation rate, positioning the effectiveness of governance as an intervening variable. The results indicated that corruption control and political stability do not exert a significant direct effect on inflation. However, public governance was proven to have a significant direct effect on inflation control with a significance value of 0.048 ($p < 0.05$). Furthermore, the path analysis results demonstrated that corruption control and political stability exert a crucial indirect effect on inflation through the effectiveness of public governance. These findings conclude that Bank Indonesia's efforts to control the inflation rate cannot stand alone but are significantly determined by the overall quality of public sector governance. Based on these conclusions, it is recommended that the government continue to strengthen institutional governance quality by enhancing corruption control and maintaining domestic political stability to ensure the achievement of national macroeconomic stability targets.

Keywords: Corruption Control, Governance, Inflation, Monetary Policy, Political Stability

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak tata kelola pemerintah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Permasalahan utama yang diangkat adalah sejauh mana faktor-faktor kelembagaan dan nonmoneter memengaruhi keberhasilan pencapaian target kebijakan moneter. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*) dengan data runtun waktu (*time series*) periode 2010–2022. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel kontrol korupsi dan stabilitas politik terhadap tingkat inflasi, dengan menempatkan efektivitas tata kelola pemerintah sebagai variabel perantara (*intervening*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung, kontrol korupsi dan stabilitas politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi. Namun demikian, tata kelola pemerintah terbukti berpengaruh langsung secara signifikan terhadap pengendalian inflasi dengan nilai signifikansi sebesar 0,048 ($p < 0,05$). Lebih lanjut, hasil analisis jalur membuktikan bahwa kontrol korupsi dan stabilitas politik memiliki pengaruh tidak langsung yang krusial terhadap inflasi melalui efektivitas tata kelola pemerintah. Temuan ini menyimpulkan bahwa upaya Bank Indonesia dalam mengendalikan tingkat inflasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan ditentukan secara signifikan oleh kualitas tata kelola kinerja pemerintah secara keseluruhan. Berdasarkan simpulan tersebut, direkomendasikan agar pemerintah terus memperkuat kualitas tata kelola kelembagaan melalui optimalisasi pemberantasan korupsi dan pemeliharaan stabilitas politik dalam negeri guna menjamin tercapainya target stabilitas makroekonomi nasional.

Keywords; Inflasi, Kebijakan Moneter, Kontrol Korupsi, Stabilitas Politik, Tata Kelola Pemerintah

PENDAHULUAN

Dinamika inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor,

mulai dari kondisi ekonomi global, rantai pasok, harga energi, hingga efektivitas tata kelola pemerintah

tentang pengendalian inflasi. Pada beberapa periode, inflasi Indonesia mengalami peningkatan signifikan akibat gangguan pasokan pangan, kenaikan harga energi, dan perubahan kebijakan fiskal.

Kondisi tersebut mempertegas peran penting tata kelola pemerintah dalam memastikan keberhasilan pengendalian inflasi di luar faktor makroekonomi. Tata kelola pemerintah merupakan instrumen nonmoneter yang krusial, mengingat fundamental makroekonomi saat ini berinteraksi secara lebih kompleks dengan berbagai faktor nonekonomi.

Tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi. Transparansi, koordinasi kebijakan lintas sektor yang kuat, dan responsivitas terhadap dinamika perekonomian makro menjadi aspek penting dalam mengurangi risiko inflasi. Upaya pengendalian inflasi di Indonesia dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Efektivitas interaksi seluruh unsur variabel ekonomi, sektor dan pelaku ekonomi sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintah.

Stabilitas politik (*Political Stability*) merupakan salah satu aspek fundamental dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kepercayaan investor terhadap suatu negara. *Political Stability* mengacu pada sejauh mana pemerintah suatu negara mampu mempertahankan legitimasi, menghindari kekerasan politik, serta menciptakan lingkungan kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi.

Political Stability yang mampu dijaga pemerintah melalui tata kelola yang baik dapat memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi bahkan memudahkan Bank Sentral untuk mengendalikan inflasi melalui skema kebijakan moneter.

Dalam konteks Indonesia, stabilitas politik cenderung membaik dalam lima tahun terakhir meskipun masih menghadapi dinamika sosial dan ekonomi dalam negeri bahkan tantangan geopolitik.

Kontrol korupsi merupakan bentuk kredibilitas dan komitmen pemerintah terhadap kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan. Kebebasan dari tekanan politik tanpa korupsi diperlukan guna membangun persepsi positif masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Persepsi masyarakat ini dapat menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas kinerja pemerintah dan kestabilan sosial kenegaraan.

Jika masyarakat puas dengan layanan publik tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik, maka diartikan bahwa layanan sipil telah memiliki independensi dan tidak terpengaruh oleh intervensi dan kepentingan politik. Kondisi ini diartikan bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan jujur (Alam *et al.*, 2017).

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang baik merupakan tanda tata kelola yang efektif dan terlaksananya kontrol kinerja bebas korupsi. Pemangku kebijakan lintas sektor mampu bekerja sama dalam menghasilkan bauran kebijakan demi terciptanya kestabilan kehidupan bernegara. Bauran kebijakan fundamental yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah

kebijakan terkait fundamental ekonomi makro seperti menjaga kestabilan harga dan inflasi, kestabilan fiskal melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara serta faktor fundamental ekonomi lainnya.

Kebijakan harus dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan melalui analisis yang mendalam dan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, kebijakan harus diimplementasikan dengan baik dan tepat waktu (Leogrande *et al.*, 2023).

Komponen penting dari kajian ini adalah komitmen pemerintah terhadap kredibilitas kebijakannya. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa mereka akan memenuhi janji dan melaksanakan kebijakannya tersebut. Keyakinan ini merupakan kondisi yang menggambarkan stabilitas politik dalam negeri dengan menjamin kestabilan fundamental perekonomian Indonesia dalam merespon gejolak politik dan ekonomi global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan untuk menguji apakah kontrol korupsi dan stabilitas politik merupakan faktor penentu efektivitas tata kelola pemerintah. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan peran tata kelola pemerintah dalam menjamin stabilitas kebijakan moneter, yang diukur melalui pengendalian tingkat inflasi..

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan teknik analisa lanjutan dari analisis regresi. Analisis

regresi pada umumnya digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara langsung terhadap variabel *dependent* (variabel terikat). Sementara itu, analisis jalur (*path analysis*) tidak hanya mengukur pengaruh langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi juga menjelaskan pengaruh tidak langsungnya melalui variabel perantara (*intervening*).

Path analysis disebut juga sebagai regresi dengan variabel mediator. Analisis ini diperlukan karena peneliti menyusun tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa jauh satu variabel mempengaruhi variabel lainnya dengan memasukkan pengaruh variabel mediator (antara) atau disebut sebagai variabel *intervening*.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember tahun 2025, menggunakan jenis data *time series* tahun 2010-2022. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang dipublikasikan oleh oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang diterbitkan oleh World Bank. Penelitian ini membahas lingkup kajian untuk seluruh wilayah Indonesia.

Hasil analisis pemodelan faktor penentu inflasi pada umumnya menggunakan model ekonometrika regresi berganda dengan menganalisa nilai koefisien regresi (disimbolkan sebagai notasi β) apakah memiliki pengaruh terhadap variabel Y (dependen).

Suatu variabel bertindak sebagai variabel *intervening* apabila variabel tersebut turut serta mempengaruhi hubungan antara variabel prediktor (*independent*) dan variabel kriteria

(*dependen*) (Baron & Kenny dalam Ghozali, 2018).

Sementara itu, penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*), yang mana parameter β digunakan untuk menganalisis nilai yang membentuk persamaan variabel perantara (*intervening*) sebagai penentu inflasi. Variabel *intervening* diperlukan karena memasukkan faktor tata kelola dan kontrol korupsi ke dalam model, dimana, ke dua variabel ini pada umumnya digunakan sebagai variabel non metrik (bersifat kualitatif) dalam kajian ilmu sosial hukum dan ketatanegaraan.

Berikut persamaan regresi yang dikembangkan menjadi *path analysis*:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 \quad (1)$$

$$Y_1 = py_1x_1 + py_1bx_2 + py_1e_1 \quad (2)$$

Berdasarkan persamaan (1) dan (2), dapat disusun hipotesis untuk penelitian ini, yaitu:

H1; Terdapat pengaruh x_1 dan x_2 terhadap y .

H2; Terdapat pengaruh x_1 , x_2 dan y terhadap z .

H3; Terdapat pengaruh x_1 dan x_2 melalui y terhadap z .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum perkembangan inflasi di Indonesia

Menurut Pappas dan Boukas (2025), inflasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: *creeping inflation* (rendah dan stabil, di bawah 3% per tahun), *galloping inflation* (meningkat cepat di atas 10% per tahun), dan *hyperinflation* (sangat tinggi dan tidak terkendali, di atas 50% per bulan). Secara teoritis, inflasi muncul akibat ketidakseimbangan antara permintaan

dan penawaran agregat. Dalam kerangka *demand-pull inflation*, kenaikan inflasi disebabkan oleh tingginya permintaan agregat akibat peningkatan pendapatan, ekspansi fiskal, atau kebijakan moneter longgar. Sebaliknya, *cost-push inflation* terjadi karena meningkatnya biaya produksi seperti upah dan harga energi (Rienadi & Setyowati, 2025).

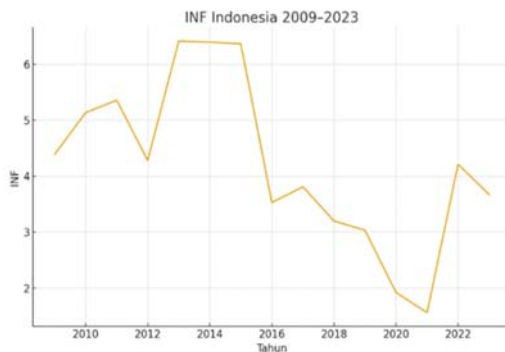
Dalam konteks Indonesia, penelitian Elina (2024) menemukan bahwa inflasi yang stabil di bawah 3,5% memiliki pengaruh positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi di atas ambang tersebut menyebabkan penurunan investasi riil dan peningkatan pengangguran jangka pendek. Penelitian ini sejalan dengan temuan Abdullah *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa volatilitas inflasi yang tinggi dapat mengurangi aliran investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) hingga 8% dalam jangka menengah karena meningkatnya ketidakpastian harga dan risiko nilai tukar.

Laporan Asian Development Bank (2011) mengestimasi bahwa setiap kenaikan 10% pada harga pangan domestik di negara berkembang Asia berpotensi meningkatkan insiden kemiskinan hingga 1,9 poin persentase. Di Indonesia, tekanan inflasi pangan pada tahun 2022 sempat menyebabkan peningkatan kemiskinan menjadi 9,8% sebelum akhirnya turun kembali pada 2024 seiring dengan stabilisasi harga beras dan bahan pokok. Stabilitas inflasi juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Menurut penelitian oleh Nguyen *et al.* (2024), inflasi yang terkendali berkontribusi terhadap peningkatan

investasi domestik dan asing, karena menjaga ekspektasi keuntungan riil investor dan menurunkan risiko ketidakpastian.

Stabilitas inflasi yang baik menunjukkan efektivitas kebijakan moneter dan fiskal, yang secara tidak langsung meningkatkan produktivitas, menstimulasi investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, pengendalian inflasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah (Judijanto, 2024).



Gambar 1. Grafik tingkat inflasi di Indonesia (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa, Inflasi Indonesia 2009–2014 berada pada level tinggi (4,2%–6,4%) terutama karena penyesuaian harga BBM, tekanan harga pangan, dan ketidakstabilan ekonomi global pasca krisis 2008. Periode 2015–2019 menunjukkan tren penurunan inflasi hingga sekitar 3% akibat penguatan koordinasi kebijakan fiskal–moneter, stabilnya harga kebutuhan pokok, dan efektifnya pengendalian inflasi daerah. Pada 2020–2021, inflasi mencapai titik terendah (1,92% dan 1,56%) sebagai dampak pandemi yang menekan konsumsi dan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, inflasi kembali naik pada 2022 menjadi 4,21% akibat kenaikan harga energi dan pangan global serta

penyesuaian BBM, sebelum turun ke 3,67% pada 2023 yang menandai stabilisasi tekanan inflasi.

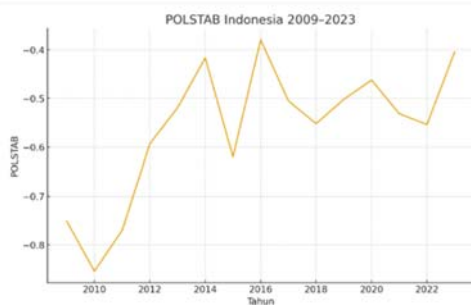
Indikator ini termasuk dalam *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang dirilis oleh World Bank, dengan skala -2,5 (sangat tidak stabil) hingga +2,5 (sangat stabil). Stabilitas politik yang tinggi umumnya berhubungan dengan tingkat investasi yang lebih besar, inflasi yang terkendali, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Dzihny *et al.*, 2023).

North (1990) menyatakan bahwa institusi yang kuat dan stabil mampu mengurangi ketidakpastian ekonomi dengan menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak kepemilikan. Sebaliknya, ketidakstabilan politik seperti konflik, pergantian pemerintahan yang tidak demokratis, dan lemahnya penegakan hukum dapat menciptakan *policy uncertainty* yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Kristofano & Febriani, 2024).

Berdasarkan data *World Governance Indicators* (World Bank, 2024), skor *Political Stability* Indonesia meningkat dari -0,46 pada 2020 menjadi -0,40 pada 2023, menunjukkan perbaikan persepsi terhadap keamanan dan ketertiban politik nasional. Dari sisi ekonomi makro, stabilitas politik berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh variabel ekonomi lainnya seperti inflasi, FDI, dan kontrol korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Negara dengan stabilitas politik tinggi cenderung memiliki transmisi kebijakan moneter dan fiskal yang lebih efektif karena tingkat kepercayaan publik dan kepastian hukum yang tinggi. Semakin stabil

kondisi politik suatu negara, semakin besar peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Ahmad *et al.*, 2024; Nguyen *et al.*, 2024).

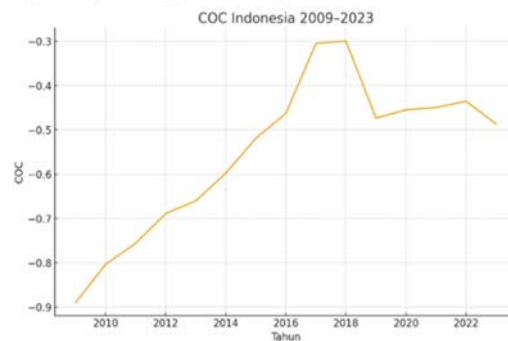


Gambar 2. Grafik perkembangan *Political Stability* di Indonesia (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa, Indikator *Political Stability* (POLSTAB) Indonesia selama 2009–2023 menunjukkan kondisi stabil namun masih didominasi nilai negatif, mencerminkan adanya risiko politik dan keamanan yang tetap perlu diwaspadai. Pada 2009–2012, nilai POLSTAB berada di kisaran **-0.85 hingga -0.59**, menandakan masih kuatnya potensi gangguan stabilitas politik seperti konflik sosial, ketegangan politik, dan ancaman keamanan yang muncul secara periodik. Memasuki 2013–2016, nilai POLSTAB perlahan membaik hingga sekitar **-0.38**, mencerminkan peningkatan ketertiban sosial serta penguatan institusi keamanan dan politik. Meskipun demikian, pada 2017–2020 indikator ini kembali fluktuatif dengan nilai antara **-0.55 hingga -0.46**, dipengaruhi oleh meningkatnya polarisasi politik, dinamika pemilu, serta kondisi ekonomi yang bergejolak pada masa pandemi. Pada 2021–2023, nilai POLSTAB masih berada pada kisaran negatif dan bergerak dari **-0.53 menjadi -0.40**, menunjukkan bahwa

meskipun risiko politik menurun, stabilitas penuh belum tercapai dan masih membutuhkan konsistensi kebijakan serta harmonisasi sosial untuk memperkuat stabilitas jangka panjang.

Control of Corruption (COC) atau pengendalian korupsi merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran kualitas tata kelola pemerintahan (*governance quality*), yang digunakan untuk menilai sejauh mana kekuasaan publik dijalankan untuk kepentingan pribadi, termasuk korupsi kecil dan besar, serta penyelewengan sumber daya negara. Indikator ini merupakan bagian dari *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang diterbitkan oleh World Bank, dengan skala pengukuran berkisar antara -2,5 (lemah) hingga +2,5 (kuat). COC menjadi elemen kunci dalam menilai efektivitas pemerintahan, kredibilitas kebijakan ekonomi, dan kepercayaan investor terhadap stabilitas institusional suatu negara (Nottage, 2023).



Gambar 3. Grafik perkembangan Indikator *Control of Corruption* (COC) di Indonesia (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa, Indikator *Control of Corruption* (COC) Indonesia dari 2009 hingga 2023 menunjukkan tren perbaikan meskipun masih berada pada nilai negatif. Pada periode 2009–2012, nilai

COC berada pada kisaran -0.89 hingga -0.71 , mencerminkan tingginya persepsi terhadap praktik korupsi dan lemahnya efektivitas pengawasan saat itu. Sejalan dengan berbagai program reformasi birokrasi, penguatan KPK, dan peningkatan transparansi publik, nilai COC terus membaik pada 2013–2017, bergerak dari -0.66 menjadi -0.30 , yang mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengendalikan korupsi. Tahun 2018 menjadi titik terbaik sementara dengan nilai -0.29 , menunjukkan capaian paling positif sepanjang periode tersebut. Namun, setelah 2019, nilai COC kembali mengalami penurunan menuju -0.47 pada 2023. Penurunan ini menggambarkan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, termasuk revisi regulasi yang melemahkan lembaga antikorupsi, dinamika politik, serta meningkatnya kasus korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Meskipun demikian, nilai COC tetap berada pada posisi yang lebih baik dibanding awal periode, menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai selama satu dekade belum sepenuhnya hilang, namun membutuhkan penguatan kembali upaya pemberantasan korupsi agar tren perbaikan berlanjut.

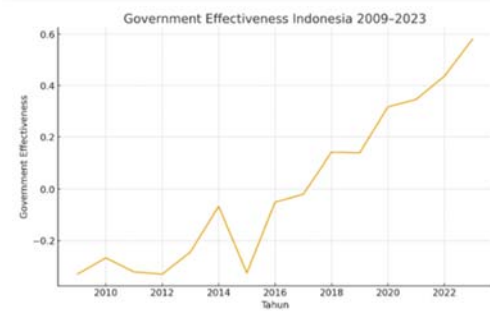
Secara teoritis, hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi telah lama menjadi perhatian para ekonom. Teori kelembagaan yang dikemukakan oleh North (1990) dan diperkuat oleh Zangina *et al.* (2020) menjelaskan bahwa institusi yang lemah dan praktik korupsi yang meluas menghambat efisiensi ekonomi, mengurangi investasi produktif, serta memperburuk distribusi pendapatan. Sebaliknya, kontrol korupsi yang

efektif dapat menciptakan iklim usaha yang transparan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat aliran investasi asing langsung (Foreign Direct Investment atau FDI) (Dao *et al.*, 2024). Penelitian empiris menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Studi oleh Kurniasih *et al.* (2023) dan Nguyen *et al.* (2024) di negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa peningkatan skor COC sebesar 1 poin berkorelasi dengan kenaikan pertumbuhan GDP sebesar 0,6%, terutama di negara dengan sistem hukum yang kuat. Hasil serupa ditunjukkan oleh Iman & Wahyudi (2024), yang menemukan bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi mengalami penurunan investasi asing hingga 15-20% dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya transaksi, ketidakpastian hukum, dan distorsi pasar akibat praktik koruptif dalam proses perizinan dan pengadaan publik.

Selain itu, kontrol korupsi juga memiliki hubungan erat dengan variabel makroekonomi lainnya seperti inflasi, FDI, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Nur *et al.* (2025) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi rendah cenderung memiliki stabilitas inflasi lebih tinggi dan daya saing ekonomi yang lebih kuat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengendalian korupsi menjadi faktor fundamental dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan ke-16 tentang "*Peace, Justice, and Strong Institutions*" (Nzenari, 2023). Negara yang mampu menjaga integritas kelembagaan dan transparansi publik akan lebih efisien dalam mengelola sumber daya

ekonomi serta lebih tangguh dalam menghadapi krisis politik maupun ekonomi. Dengan demikian, *Control of Corruption* (COC) merupakan variabel kelembagaan yang memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam penelitian ini, COC digunakan sebagai variabel independen yang memengaruhi kinerja ekonomi nasional, khususnya melalui pengaruhnya terhadap pertumbuhan GDP. Semakin baik kontrol korupsi, semakin tinggi efisiensi penggunaan sumber daya publik, semakin kuat kepercayaan investor, dan semakin besar potensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (United Nations Development Programme [UNDP], 2024).

Government Effectiveness (GE) mengukur persepsi kualitas layanan publik, kualitas pegawai negeri sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Salah satu ukuran efektivitas tata kelola adalah efektivitas pemerintah (*Government Effectiveness Index*). Nilai dari indikator ini dapat diukur melalui *Government Effectiveness Index*. Indeks ini mengevaluasi legitimasi janji pemerintah untuk mengukur, mempertahankan atau meningkatkan standar kualitas layanan publik, kualitas pegawai negeri sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan (World Bank, 2024).



Gambar 4. Grafik perkembangan *Government Effectiveness* di Indonesia (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa, *Government Effectiveness* Indonesia menunjukkan tren perbaikan yang cukup konsisten sepanjang 2009–2023. Pada awal periode (2009–2013), nilainya masih berada di wilayah negatif, mencerminkan tantangan dalam kualitas layanan publik, efektivitas birokrasi, dan implementasi kebijakan. Meski sempat mengalami penurunan tajam pada 2015, indikator ini mulai membaik secara signifikan sejak 2016. Memasuki 2018–2021, nilai *Government Effectiveness* bergerak positif dan terus meningkat, didorong oleh penguatan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta semakin stabilnya tata kelola pemerintahan. Pada 2022 dan terutama 2023, indikator ini mencapai titik tertinggi dalam deret data, menandai meningkatnya persepsi terhadap kapasitas pemerintah Indonesia dalam merancang dan melaksanakan kebijakan secara efektif. Di sisi lain, perwujudan dampak tata kelola pemerintahan yang baik perlu juga untuk diukur agar pemerintah tetap konsisten meningkatkan standar pelayanan publik, memastikan independensi pegawai negeri sipil, menciptakan kebijakan yang berhasil, dan menjunjung tinggi legitimasi komitmen mereka terhadap kebijakan

tersebut (Dahan & Strawczynski, 2020).

2. Hasil penelitian

Persamaan path analysis (1) dan (2) merupakan landasan untuk merumuskan hipotesa yang digunakan pada penelitian ini. Variabel yang diukur pada model persamaan regersi *path analysis* pada penelitian ini yaitu:

- X1 = Variabel Kontrol Korupsi
- X2 = Variabel Stabilitas Politik
- Y = Variabel Tata Kelola Pemerintah
- Z = Variabel Inflasi

Hasil dan temuan penelitian ini dapat dilihat dari analisis output atau hasil olah data *path analysis* sebagai berikut;

Tabel 1.

Model Summary pengaruh stabilitas politik dan kontrol korupsi melalui variabel tata Kelola pemerintah tahun 2009-2023.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.695 ^a	.483	.342	1.228009626822656	1.797

a. Predictors: (Constant), POLSTAB, Government Effectiveness, COC
b. Dependent Variable: INF

Tabel 2. Model Summary pengaruh tata kelola pemerintah terhadap inflasi tahun 2009-2023.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.574 ^a	.330	.218	275.230.501.608.076,060	.543

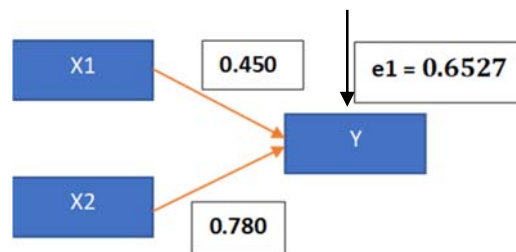
a. Predictors: (Constant), POLSTAB, COC
b. Dependent Variable: Government Effectiveness

a. Koefisien jalur model i

Analisa koefisien jalur model I didasarkan pada output regresi model

I pada tabel *coefficients*. Berdasarkan tabel *coefficients* ini diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel kontrol korupsi dan stabilitas politik, yaitu $x_1 = 0.191$ lebih besar dari 0.05 dan $x_2 = 0.030$ lebih kecil dari 0.05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model I, yakni variabel kontrol korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap tata kelola pemerintah, namun stabilitas politik berpengaruh signifikan terhadap tata kelola pemerintah.

Besarnya nilai R^2 (*R Square*) yang terdapat pada tabel model *summary* adalah sebesar 0.574. Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh kontrol korupsi dan stabilitas politik terhadap tata kelola pemerintah sebesar 57.4%. Sementara, sisanya sebesar 42.6% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nilai e_1 dapat ditentukan dengan rumus $e_1 = \sqrt{1-0.574} = 0.6527$. Berdasarkan output olah data ini. Maka dapat disajikan diagram jalur model struktur I sebagai berikut;



Gambar 5. Jalur Model Struktur I (Data diolah)

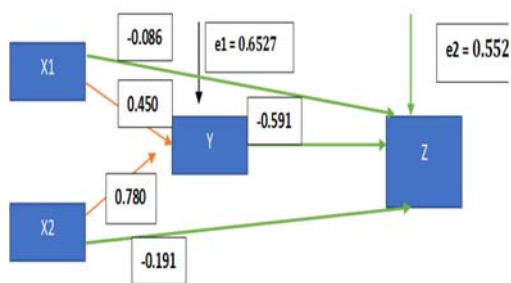
b. Koefisien jalur model ii

Analisa koefisien jalur model I didasarkan pada output regresi model I pada tabel *coefficients*. Berdasarkan tabel *coefficients* ini diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel kontrol korupsi, stabilitas politik dan tata kelola pemerintah yaitu $x_1 = 0.816$; $x_2 =$

0.564 lebih besar dari 0.05 dan $y = 0.048$ lebih kecil dari 0.05.

Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model II, yakni variabel kontrol korupsi dan stabilitas politik tidak berpengaruh signifikan terhadap z (inflasi). Sedangkan tata kelola pemerintah berpengaruh signifikan terhadap (z) inflasi.

Besarnya nilai R^2 (R Square) yang terdapat pada tabel model *summary* adalah sebesar 0.695. Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh kontrol korupsi, stabilitas politik dan tata kelola pemerintah terhadap inflasi adalah sebesar 69.5%. Sementara, sisanya sebesar 30.5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nilai e^2 dapat ditentukan dengan rumus $e^2 = \sqrt{1 - 0.695} = 0.5523$. Berdasarkan output olah data ini, maka dapat disajikan diagram jalur model struktur II sebagai berikut;



Gambar 6. Jalur Model Struktur I (Data diolah)

3. Pembahasan output olah data

Tahapan uji hipotesis pada penelitian ini dapat dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:

1) Analisis pengaruh x_1 terhadap y menunjukkan nilai signifikansi kontrol korupsi sebesar $0.191 > 0.05$, sehingga

dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan kontrol korupsi terhadap tata kelola pemerintah.

2) Analisis pengaruh x_2 terhadap y menunjukkan nilai signifikansi stabilitas politik sebesar $0.030 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan stabilitas politik terhadap tata kelola pemerintah.

3) Analisis pengaruh x_1 terhadap z menunjukkan nilai signifikansi kontrol korupsi sebesar $0.816 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikan kontrol korupsi terhadap tata Kelola pemerintah.

4) Analisis pengaruh x_2 terhadap z menunjukkan nilai signifikansi kontrol korupsi sebesar $0.564 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan stabilitas politik terhadap tata kelola pemerintah.

5) Analisis pengaruh y terhadap z menunjukkan nilai signifikansi tata kelola pemerintah sebesar $0.048 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan tata kelola pemerintah terhadap inflasi.

6) Analisis pengaruh x_1 melalui y terhadap z menunjukkan nilai signifikansi kontrol korupsi terhadap inflasi sebesar $0.191 > 0.05$. Sedangkan pengaruh tidak langsung kontrol korupsi melalui tata kelola pemerintah terhadap inflasi adalah

perkalian antara nilai beta x1 terhadap y dengan nilai beta y terhadap z yaitu; $0.450 \times 0.591 = 0.2660$. Maka, pengaruh total yang diberikan variabel kontrol korupsi terhadap inflasi adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu; $0.086 + 0.2660 = 0.3520$.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka nilai pengaruh langsung sebesar 0.086 dan pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada nilai pengaruh secara langsung.

Hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung variabel kontrol korupsi melalui pengaruh tata Kelola pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap inflasi.

7) Analisis pengaruh x2 melalui y terhadap z menunjukkan nilai signifikansi stabilitas politik terhadap inflasi sebesar $0.033 < 0.05$. Sedangkan pengaruh tidak langsung stabilitas politik melalui tata kelola pemerintah terhadap inflasi adalah perkalian antara nilai beta x2 terhadap y dengan nilai beta y terhadap z yaitu; $0.780 \times 0.591 = 0.4609$.

Maka, pengaruh total yang diberikan variabel stabilitas politik terhadap inflasi adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu; $0.191 + 0.4609 = 0.6519$. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka nilai pengaruh langsung sebesar 0.191 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0.6519 yang berarti bahwa pengaruh secara tidak langsung lebih besar daripada pengaruh secara langsung. lebih kecil daripada nilai

pengaruh. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung variabel stabilitas politik melalui pengaruh tata kelola pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap inflasi.

KESIMPULAN

Nilai koefisien jalur model I menunjukkan bahwa faktor kontrol korupsi dan stabilitas politik menentukan kualitas tata kelola pemerintah.

Apabila pemerintah ingin berfokus pada perbaikan tata kelola, maka pemerintah sebaiknya dapat menjamin bahwa sistem pemerintahan berjalan baik, terhindar dari gejolak dan konflik yang memberikan efek destruktif agar rezim pemerintah berjalan baik dalam jangka waktu lama. Kondisi ini dapat menjamin konsistensi realisasi kebijakan yang telah disusun dan diperkuat oleh kepastian hukum tanpa adanya tekanan dan ancaman politik.

Nilai koefisien jalur model II menunjukkan bahwa secara tidak langsung variabel kontrol korupsi dan stabilitas politik merupakan faktor penentu inflasi di Indonesia. Faktor ini menjadi penentu kestabilan inflasi di Indonesia apabila tata kelola pemerintah telah berjalan efektif dan efisien.

Apabila pemerintah telah melaksanakan tata kelolanya secara efektif dan efisien, maka kebijakan pengendalian inflasi dapat direalisasikan sesuai dengan target kebijakan moneter. Salah satu target kebijakan moneter tersebut

merupakan upaya menjaga kestabilan inflasi agar harga-harga kebutuhan barang dan jasa dapat dijangkau oleh masyarakat sesuai dengan daya belinya. Kemampuan daya beli masyarakat ini dapat menjamin terpenuhinya permintaan agregat konsumsi barang dan jasa seluruh sektor ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini dapat memberikan kesimpulan bahwa variabel kontrol korupsi dan variabel stabilitas politik melalui pengaruh tata kelola pemerintah mempunyai pengaruh signifikan terhadap inflasi.

Implikasi kebijakan berdasarkan hasil temuan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang pentingnya menjaga kualitas tata kelola kinerja pemerintah. Tata kelola kinerja pemerintah ini menjadi faktor penentu melalui faktor pengendalian korupsi dan stabilitas politik dalam negeri.

Tata Kelola kinerja pemerintah dapat menjamin terlaksananya proses penyusunan hingga implementasi bauran kebijakan terutama kebijakan moneter melalui variabel kestabilan harga (inflasi).

Tim Pengendali Inflasi Regional dapat melakukan proses bauran kebijakan moneter dengan memperhitungkan kebijakan dari sisi fiskal dan faktor makro internasional seperti cadangan devisa dan kestabilan nilai tukar Rupiah.

Gagasan selanjutnya dari penelitian ini merupakan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Dimana, penelitian lebih lanjut dapat membahas tema tentang pengendalian indikator kestabilan makro ekonomi selain inflasi. Indikator lainnya ini dapat menggunakan tema analisa pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan fiskal di Indonesia. Indikator kestabilan makro ekonomi ini dapat dikembangkan dengan kombinasi analisa dari faktor sosial-hukum seperti *rule of law* (penegakan hukum) dan faktor luar negeri dengan mempertimbangkan indikator geopolitik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama penulis ditujukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, khususnya pimpinan Program Studi Ekonomi Pembangunan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini, terutama kepada lembaga dan institusi penyedia data analisis dengan variabel penelitian tata kelola pemerintah dan inflasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Aisah, S., & Basri, M. (2024). Institutional quality, foreign direct investment, and economic growth in ASEAN countries. *Journal of Economic Development Studies*, 12(3), 45–62.
- Ahmad, J., Fayaz, M., Rehman, Z. U., Tariq, A., & Masheed, Q. (2024). Causal link between governance and economic growth: empirical evidence from the SAARC countries. *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, 8(1), 132-150.

- Alam, M. R., Kiterage, E., & Bizuayehu, B. (2017). Government effectiveness and economic growth. *Economic Bulletin*, 37(1), 222-227.
- Asian Development Bank. (2011). *Global food price inflation and developing Asia*. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28608/global-food-price-inflation.pdf>
- Dahan, M., & Strawczynski, M. (2020). Budget institutions and government effectiveness. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(2), 217-246. <https://doi.org/10.11108/JPBAFM-03-2019-0055>
- Dao, L. T., Bui, N. T., & Doan, T. T. (2024). Corruption and foreign direct investment: Bayesian analysis approach. *Journal of Governance & Regulation*, 13(2), 255-266. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i2siart2>
- Dzihny, I., Wibowo, M. G., & Ihsan, A. (2023). Macroeconomics, human development and political stability: Evidence from OIC countries. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2). <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.19509>
- Elina, R. (2024). The impact of FDI, unemployment, carbon emissions, and inflation on economic growth in OIC countries: Toward long-term economic resilience. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 3(2 Desember), 54-68.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iman, C. N., & Wahyudi, S. T. W. (2024). Keterkaitan antara foreign direct investment, perdagangan internasional, indeks persepsi korupsi, nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 295-304.
- Judijanto, L. (2024). The impact of inflation on economic growth: A comprehensive literature study. *Journal of Community Dedication*, 4(4), 786-796.
- Kristofano, Y. Y., & Febriani, R. E. (2024). The role of political stability and foreign direct investment in Indonesia's economic growth. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 3(3), 261-276.
- Kurniasih, E. P., Islahiyah, D., Kurniawati, S., & Iqbal, I. (2023). Does corruption affect foreign direct investment? Empirical evidence from ASEAN Plus Three countries. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 26(2), 167-179. <https://doi.org/10.14414/jebav.v26i2.3256>
- Leogrande, A., Laureti, L., & Costantiello, A. (2023). The innovation index in Europe. *International Journal of Entrepreneurship*. 27. 1-45.
- Nguyen, T. P., Thu, T. H. I., Dinh, H., & Tran, N. T. H. O. (2024). Exploring the role of institutional quality, trade openness, and financial development in driving the real exchange rate: Evidence in Southeast Asia countries. *Montenegrin Journal of Economics*, 20(2), 183-194. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2024.20-2.15>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Nottage, L. (2023). *Corruption and illegality in Asian investment arbitration*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-9303-1>
- Nur, U., Mutiarin, D., Jovita, H. D., Palomares, P. P., & Isolana, J. B. (2025). The role of good governance indicators in controlling corruption. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(1), 83-99.
- Nzenari, U. P. (2023). Corruption as a contributing factor to unemployment and environmental pollution in Nigeria: the niger delta perspective. *Journal of Government and Political Issues*, 3(1), 10-17.
- Pappas, A., & Boukas, N. (2025). Examining impact of inflation and inflation volatility on economic growth: Evidence from European Union economies. *Economies*, 13(2), Artikel 31.
- Rienadi, N. P., & Setyowati, E. (2025). The effect of FDI, exports, inflation on economic growth of the America and India 1983-2022. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(3), 1730-1747.

- United Nations Development Programme. (2024). *Report 2023/2024: Reimagining cooperation in a polarized world*.
- World Bank. (2024). *Worldwide Governance Indicators*.
<https://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- Zangina, S., Hassan, S., & Harun, M. (2020). Corruption and foreign direct investment: A conceptual review. *Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 22–32.